

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: *Legal Theory & Judicialprudence*, 2009, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta.
- Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Aswanto, Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, 2012, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung.
- Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, AAI, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar Muchi dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fence M. Wantu, 2010, *Idee Des Recht* kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 2011, Cetakan keempat, Bandung: Nusa Media.
- Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Semarang.
- Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, Hukum Pidana Terorisme Teori dan praktik, Gramata, Jakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Cetakan 3, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan metode penelitian hukum, Malang : UMM Press.
- Nadia E. Nedzel, *The Rule of Law: Its History and Meaning in Common Law, Civil Law, and Latin American Judicial Systems*, *Richmond Journal of Global Law and Business*, 2010.
- Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum (*de Structuur Der rechtswetenschap*). Cetakan 3, Bandung: Alumni, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Robert B. Seidman, 1971, *Law order and Power*, *Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett*.
- Romli Atmasasmita, 1997, Krimonologi, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Saeharodji, H. Hari, 1980, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta.
- Saifullah, 2010, Refleksi sosiologi hukum, Bandung : Refika Aditama.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Press.

Sudjono Dirdjosisworo, 1983, Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi Suatu pengantar, Rajawali Pers, Bandung.

Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, PT Grafindo, Jakarta.

Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Penerjemah: M. Khozim, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional.

KEPMEN No. 77 K-90-MEM-2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu.

Peraturan Menteri ESDM No.48 Tahun 2018 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Media Elektronik

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/05450011/gara-gara-layanan-gardu-pln-di-bali-padam-5-jam-pemilik-ditangkap-polisi?page=all>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5198930/siapa-pemilik-layang-layang-yang-bikin-listrik-8-kabupaten-di-jatim-padam>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5116174/listrik-di-wilayah-jateng-diy-padam-ternyata-gegara-benang-layanan>

